

PEMKAB GUNUNG MAS GENCARKAN OPERASI PASAR MURAH JELANG IDUL FITRI



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Kuala Kurun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat mengencarkan operasi pasar murah dengan menjual paket bahan pokok di sejumlah kecamatan, jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Sekretaris Daerah Gumus Richard di Kuala Kurun, Senin, mengatakan kegiatan ini bertujuan mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, serta menghadapi Hari Besar Keagamaan dimana permintaan kebutuhan bahan pokok cenderung meningkat.

“Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Kuala Kurun, namun juga di kecamatan-kecamatan lain sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata di kabupaten yang kita cintai ini,” sambungnya.

Pada pelaksanaan operasi pasar murah kali ini juga tersedia ratusan tabung gas LPG 3 kilogram. Richard menyampaikan terima kasih kepada berbagai pemangku kepentingan yang telah ikut berpartisipasi, sehingga gas LPG 3 kg juga tersedia pada kegiatan ini.

Sementara itu, Kepala Disperindag Gumus Supervisi Budi mengatakan operasi pasar murah rencananya dilaksanakan di enam kecamatan yakni Kurun, Sepang, Mihing Raya, Rungan, Manuhing, dan Tewah.

Dalam pelaksanaan operasi pasar murah, Disperindag menggandeng pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa, untuk menentukan masyarakat yang bisa mengikuti kegiatan ini. Dengan demikian masyarakat penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.

Paket bahan pokok yang dijual terdiri dari 10 kg beras premium, dua liter minyak goreng, dan dua kg gula. Pemkab Gumus memberi subsidi sebesar Rp70 ribu terhadap keseluruhan paket tadi.

“Untuk paket 10 kg beras premium, dua liter minyak goreng, dan dua kg gula, harga normalnya kalau di Kuala Kurun mencapai Rp250 ribu. Setelah mendapat subsidi Rp70

ribu dari pemda, maka masyarakat hanya perlu membayar Rp180 ribu untuk paket bahan pokok tadi,” paparnya.

Nantinya saat pelaksanaan operasi pasar murah di kecamatan lain pemda tetap memberi subsidi senilai Rp70 ribu. Untuk harganya tergantung dengan harga pasaran di masing-masing kecamatan, karena harga pasaran di kecamatan yang satu belum tentu sama dengan harga pasaran di kecamatan lain.

Saat pelaksanaan operasi pasar murah di Kuala Kurun, Disperindag menyiapkan 600 paket bahan pokok. Operasi pasar murah akan berlanjut di kecamatan-kecamatan lain, dengan jumlah paket masing-masing kecamatan mencapai ratusan.

Lebih lanjut, pada pelaksanaan operasi pasar murah di beberapa kecamatan, ada pemberian Kuota Khusus dari PT Pertamina Patra Niaga, sebagai bentuk pengendalian Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasaran yakni gas LPG 3 kg sebanyak 800 tabung. Kecamatan yang dimaksud adalah kecamatan yang sudah dikonversi yakni Kurun, Tewah, Mihing Raya, dan Sepang

“Kalau HET gas LPG 3 kg adalah Rp31.300,- sedangkan di operasi pasar murah ini dipatok Rp31 ribu. Membelinya juga menggunakan aplikasi MyPertamina, supaya tepat sasaran. Bagi yang belum terdaftar, petugas siap mendaftarkan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga,” demikian Supervisi Budi.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/750113/pemkab-gunung-mas-gencarkan-operasi-pasar-murah-jelang-idul-fitri>, Senin, 17 Maret 2025.
2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/gunung-mas-gencarkan-operasi-pasar-murah-jelang-lebaran-jaga-inflasi-dan-daya-beli-masyarakat-352243-mvk.html>, Rabu, 19 Maret 2025.

Catatan:

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu melaksanakan operasi pasar dan/atau pasar murah. Paket sembako murah sering kali merupakan bagian dari program bantuan sosial di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.